

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Strategi, Pengalaman, dan Teknik

Penulis:

Denny Hermawan Ritonga, Harris Fadhillah,
Rizky Ramadhan, Ajizah Nurul Fadhilah Siddiq,
Syindi Putri Padilla, Aminatun Nisa, Intan Suci Melani,
Sri Ayu Ulandari, Ahmad Hussein Mangku Anom,
Vera Widya Ningsih Rangkuti, Nairatul Anisah,
Muhammad Rusdi, Laila Fitri, Maisya Nurhalija, Alvi Khaira,
Muhammad Syam, Pahmi Barus, Citra Anggraini,
Husnul Arifin, Rawiyah Safitri Amanda,
Muhammad Wisudawan, Refli Sepriandito, Anis Sa'adah,
Dinny Rahmayani Zebua

Editor: Ilham Mirzaya Putra, S.E., M.Si

CV. Prokreatif

PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT: Strategi, Pengalaman, dan Teknik

Penulis:

Denny Hermawan Ritonga, Harris Fadhillah, dkk.

Editor:

Ilham Mirzaya Putra, S.E., M.Si

ISBN:

978-623-8266-18-0

Tata Letak dan Desain Sampul

Tim Prokreatif

Penerbit:

CV. Prokreatif

Anggota IKAPI No. 059/SUT/2021

Perumahan Mansyur USU Regency Blok A4

Medan, Sumatera Utara

Web : www.penerbit.prokreatif.com

Instagram : [@pro_kreatif](https://www.instagram.com/pro_kreatif)

E-mail : cv.prokreatif@gmail.com

Cetakan Pertama, Juli 2023

x + 269 halaman, 14,8 x 21 cm

Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Pada zaman yang terus berkembang ini, pengembangan ekonomi masyarakat menjadi hal yang semakin penting. Memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka adalah langkah awal yang krusial dalam membangun fondasi keberlanjutan sosial dan ekonomi yang kokoh.

Dalam buku ini, para penulis dengan cermat menjelajahi berbagai strategi yang telah teruji dan pengalaman yang berharga dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Mereka mengulas teknik-teknik inovatif yang dapat menjadi panduan praktis bagi pembaca yang berkecimpung dalam bidang ini.

Setiap bab di dalam buku ini membahas topik-topik yang mendalam, mulai dari perencanaan dan implementasi program pengembangan ekonomi, hingga pengelolaan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat. Pembaca akan diperkenalkan dengan konsep-konsep teoritis yang mendasari praktik pengembangan ekonomi masyarakat, serta mendapatkan wawasan tentang pendekatan yang efektif untuk mengatasi tantangan nyata di lapangan.

Para penulis buku ini terdiri dari orang-orang yang menelusuri pengalaman para praktisi pengembang ekonomi masyarakat. Karya mereka tidak hanya berasal dari observasi dan analisis akademis, tetapi juga didasarkan pada penelitian lapangan yang mendalam. Hal ini memberikan buku ini kekuatan yang kuat dalam memberikan perspektif yang komprehensif dan praktis tentang pengembangan ekonomi masyarakat.

Buku "Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Strategi, Pengalaman, dan Teknik" ini diharapkan akan menjadi sumber inspirasi dan panduan berharga bagi para profesional, akademisi, dan mahasiswa yang tertarik dengan bidang pengembangan ekonomi masyarakat. Kami berharap bahwa buku ini dapat mendorong diskusi yang lebih lanjut, kolaborasi yang erat, dan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Terkhusus, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Tanpa dukungan, dedikasi dan kerja keras mereka, buku ini tidak akan menjadi kenyataan. Saya juga ingin berterima kasih kepada tim penerbit yang telah memberikan dukungan yang berharga dalam proses penggarapan buku ini.

Selamat membaca dan semoga buku ini memberikan wawasan yang berharga dan menginspirasi pembaca untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Salam Pemberdayaan,

Ilham Mirzaya Putra, SE., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT	1
Oleh: Denny Hermawan Ritonga	
STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MANDIRI	12
Oleh: Harris Fadhillah	
STRATEGI YANG DAPAT DITERAPKAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT	22
Oleh: Rizky Ramadhan	
STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT DENGAN MENGEMBANGKAN KAPASITAS AKAR RUMPUT	33
Oleh: Ajizah Nurul Fadhilah Siddiq	
STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT YANG EFISIEN	42
Oleh: Syindi Putri Padilla	
STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	51
Oleh: Aminatun Nisa	

PENGEMBANGAN MASYARAKAT MENUJU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN	59
Oleh: Intan Suci Melani	
STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM DESA WISATA	68
Oleh: Sri Ayu Ulandari	
STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN EKONOMI MASYARAKAT	79
Oleh: Ahmad Hussein Mangku Anom	
DINAMIKA BUDIDAYA LEBAH MADU AGAR BERKUALITAS DI MASYARAKAT	93
Oleh: Vera Widya Ningsih Rangkuti	
URBANISASI, DANA DESA, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	101
Oleh: Nairatul Anisah	
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN	109
Oleh: Muhammad Rusdi	
CATATAN PERJALANAN Prio Handoko S.Sos.	120
Oleh: Laila Fitri	

PEMBERDAYAAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT	129
Oleh: Maisya Nurhalija	
KEMITRAAN DALAM UMKM MASYARAKAT JAWA TIMUR	144
Oleh: Alvi Khaira	
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN	157
Oleh: Muhammad Syam	
CATATAN PERJALANAN Prof. Dr. H. Muzakkir, M.A.	168
Oleh: Pahmi Barus	
TEKNIK BUDIDAYA TANAMAN TOMAT CHERRY (<i>Lycopersicum cerasiformae mill</i>)	191
Oleh: Citra Anggraini	
TEKNIK PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT	197
Oleh: Husnul Arifin	
TEKNIK BUDIDAYA TANAMAN BENGKUANG	208
Oleh: Rawiyah Safitri Amanda	

TEKNIK BUDIDAYA KENTANG 216
Oleh: Muhammad Wisudawan

TEKNIK PENGELOLAAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT 227
Oleh: Refli Sepriandito

TEKNIK SEDERHANA BUDIDAYA TANAMAN TERONG (*Solanum melongena*) 235
Oleh : Lina Kristina

TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU UNTUK KEPENTINGAN SECARA BERKELANJUTAN 242
Oleh: Anis Sa'adah

TEKNIK PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (AIR) 261
Oleh: Dinny Rahmayani Zebua



STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Oleh: Denny Hermawan Ritonga

A. Asset-Based Community Development

Tinjauan Umum Asset-Based Community Development

Aset bukanlah sesuatu yang ada begitu saja atau bukanlah kepemilikan atas sesuatu. Lebih tepatnya aset merupakan hak atau klaim yang berhubungan dengan properti baik konkret maupun abstrak. Hak dan klaim ini dilindungi oleh adat, konvensi atau hukum, sedangkan kepemilikan pribadi adalah klaim sosial seseorang untuk menggunakan ataupun melarang menerima keuntungan dari hak-hak tertentu.

Kepemilikan aset ini sama dengan pengertian dalam hal pendapatan seseorang, namun secara terperinci memiliki perbedaan yang mendasar untuk memahaminya. Aset memiliki kelebihan dibanding pendapatan,

kelebihan ini terlihat dari sumber yang didapat dari masing-masing. Aset sudah ada secara alamiah yang lebih bersifat paten dan terus-menerus, sedangkan pendapatan hanya sebuah usaha yang didapat dari pekerjaan seseorang. Sehingga pendapatan bisa dimungkinkan menghilang dan habis lebih cepat dibanding aset yang dikembangkan dengan baik.

Kelebihan dan perbedaan aset juga terlihat dari prinsip yang digunakan masing-masing. Seseorang mendapatkan sebuah pendapatan dengan berusaha kerja keras sehingga dalam pikiran lebih bersifat konsumtif dan melakukan segala cara, sedangkan dalam aset seseorang lebih berprinsip menjaga dan mengembangkan. Secara teori menjaga dan mengembangkan lebih kepada pertahanan identitas yang ada dibandingkan mendapatkan sesuatu yang baru.

Komunitas ditingkat lokal secara hakiki telah menyumbangkan suatu aset atau modal yang menjadi sumber daya bagi komunitas tersebut, setidaknya terdapat enam aset, yakni modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, modal teknologi, modal manusia dan modal sosial. Aset-aset tersebut merupakan potensi yang perlu dikembangkan dalam menunjang kesejahteraan di suatu masyarakat.

Secara konsep aset dibagi dengan nyata (*tangible*) dan tidak nyata (*intangible*), masing-masing tipe aset tersebut dapat dikategorisasikan (dalam semua hal kategori) sebagai sesuatu yang nyata dan tidak nyata.

a. Aset-Aset yang Nyata (Tangible Aset)

Aset nyata merupakan sesuatu yang sah dimiliki termasuk di dalamnya properti fisik sebagaimana hak milik dan berfungsi sama seperti properti fisik. Ini dapat dibagi menjadi delapan kategori umum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tabungan uang yang pemasukannya dalam bentuk bunga.
Dalam hal yang termasuk adalah semua tabungan yang dimilikinya, baik rekening tabungan, rekening cek dan semua instrumen pasar keuangan
- 2) Saham
Surat tanggungan, dan semua bentuk jaminan finansial yang bentuk pemasukannya seperti saham bunga.
- 3) Properti nyata.
Seperti bangunan atau tanah, dengan pemasukan dalam bentuk pembayaran sewa beserta keuntungan.
- 4) Aset-aset berat
Dengan pemasukan dalam bentuk keuntungan modal. Dalam hal ini berarti seperti metal berharga, perhiasan furnitur, dan semua koleksi lainnya.
- 5) Mesin
Alat-alat dan komponen produksi nyata lainnya.
- 6) Barang keluarga yang kuat dan tahan lama

Dengan keuntungan lewat meningkatnya efisiensi tugas keluarga

7) Sumber alam

Seperti perkebunan, minyak, mineral, dan kayu hutan.

8) Hak cipta dan hak paten

Dengan keuntungan dalam bentuk royalti dan biaya penggunaan lainnya.

Secara lebih jelasnya dalam aset nyata ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aset fisik yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan aset yang berikutnya adalah aset tidak nyata

b. Aset Tidak Nyata (Intangible Asset)

Aset tidak nyata ini lebih bersifat tidak pasti, tidak secara legal diatur dan sering kali diatur secara tidak jelas oleh karakter individu atau hubungan sosial dan ekonomi, adapun yang dalam termasuk aset tidak nyata sebagai berikut :

1) Manusia (human capital)

Secara umum memiliki inteligensi, pendidikan, pengalaman kerja, pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan juga energi, visi, dan harapan.

2) Modal Budaya (cultural capital)

Dalam bentuk subjek yang signifikan seperti kemampuan berbicara, cara berpakaian, budaya yang berlaku di suatu daerah, dll.

- 3) Modal sosial informal (Informal social Capital)
Dalam bentuk keluarga, teman, koneksi yang datang, lebih tepatnya informasi yang dimiliki seseorang dalam mengembangkan setiap pekerjaan dan urusannya.
- 4) Modal sosial formal atau modal organisasi
Artinya struktur organisasi yang ada di suatu daerah dan peraturan yang ada.
- 5) Modal politisi dalam bentuk partisipasi

Tipe-tipe yang nyata dan tidak nyata ini tidak bersifat paten dan masih bersifat arbitratif yang tentunya masih bisa berkembang bahkan dipadukan dengan aset satu dengan aset lainnya bahkan ditambahkan. Beberapa tipe-tipe lain dari aset seperti nilai tradisional, pencerahan spiritual, penampilan yang karismatik, Dll. Pada akhirnya cukup kiranya uraian pemahaman mengenai aset. Sehingga dapat memberikan pemahaman untuk memasuki Program Asset Based Community Development dalam pemberdayaan masyarakat.

B. Mengembangkan Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Kini, masyarakat Indonesia dilanda musibah berupa krisis ekonomi yang berkepanjangan, ekonomi rakyat Indonesia—yang notabene mayoritas umat Islam—Kian perak-poranda. Tentu saja kondisi demikian menuntut adanya jalan keluar, berupa sikap hidup yang super-hemat dan produktif, pemanfaatan uang yang ada secara

maksimal-investatif, pilihan strategis-futuristik, lingkungan yang edukatif metodologis, manajemen yang profesional dan win-win, pergaulan pendidikan yang tercerahkan, pergaulan sosial yang emansipatif-transformatif, dan terutama, silaturahmi yang inspiratif-produktif.

Semua itu, di samping menuntut penguasaan terhadap *life skill* atau keahlian hidup, juga pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang selama ini tidak pernah ‘dilirik’.

Premisnya sederhana, selama ini rakyat terlampaui dizalimi dan disisihkan, sistem ekonomi yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang, dengan menelantarkan ratusan juta orang lainnya.

Salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa ini adalah tingkat kesenjangan ekonomi yang terlampaui lebar, serta tingkat kemiskinan yang terlampaui menakutkan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan saat ini telah dengan sukses mengantar bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa termiskin di dunia. Untuk itu, upaya-upaya pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi hal yang mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Menurut Goenawan Sumodiningrat, kalau dilihat dari segi penyebabnya, kesenjangan dan kemiskinan dapat dibedakan menjadi kesenjangan dan kemiskinan

natural, kesenjangan dan kemiskinan cultural, serta kesenjangan dan kemiskinan struktural.

Kesenjangan dan kemiskinan natural adalah kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti perbedaan usia, perbedaan kesehatan, perbedaan geografis tempat tinggal, dan sebagainya. Kesenjangan dan kemiskinan cultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat, perbedaan etika kerja, dan sebagainya. Adapun kesenjangan dan kemiskinan struktural adalah kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti distribusi aset ekonomi yang timpang, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, koruptif, dan koruptif, serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung tidak menguntungkan kelompok masyarakat atau golongan tertentu.

Berangkat dari ketiga macam jenis kesenjangan dan kemiskinan tadi, di satu pihak harus diakui bahwa di tengah-tengah masyarakat kita masih ada faktor-faktor natural dan cultural yang membuat masyarakat kita agak sukar untuk beranjak dari lembah kemiskinan yang selama ini akrab dengan mereka. Di sisi lain, penyebab terbesar yang membuat mereka terus-menerus berkubang dalam jurang kemiskinan adalah justru faktor struktural, yang diindikasikan oleh lemahnya tingkat pengawasan yang mengakibatkan korupsi dan kolusi demikian merajarela.

Dengan demikian, upaya pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat, perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan struktural. Hal itu bisa dilakukan dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam konstelasi perekonomian nasional.

Perubahan struktural ini bisa meliputi proses perubahan dari pola ekonomi tradisional ke arah ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dari ekonomi substansi ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian, dari konglomerat ke rakyat.

Perubahan struktural seperti ini tentu mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengawasan sumber daya, penguatan kelembagaan, penguasaan kelembagaan, serta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Berkaitan dengan langkah-langkah di atas maka pilihan kebijakan hendaklah dilaksanakan dalam beberapa langkah strategis berikut:

1. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi.

Di antara aset produksi yang paling mendasar adalah akses kepada sumber dana. Tersedianya dana yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi yang kecil, sehingga dapat digunakan untuk pemupukan modal secara berkesinambungan.

2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.

Sebagai produsen dan penjual, posisi dan kekuatan rakyat dalam perekonomian sangat lemah. Selain itu, upaya yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi ini dengan pendekatan kebersamaan.

Dengan membangun kebersamaan dan kesetiakawanan, akan timbul rasa percaya diri dan harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi.

3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang kuat dan tangguh.

Upaya-upaya perbaikan kesehatan dan pelayanan pendidikan harus dilakukan tanpa henti dengan memperhatikan kualitas yang semakin baik. Hal itu bisa dilakukan melalui berbagai upaya, misalnya pendidikan formal biasa, pelatihan-pelatihan, eksperimen di lapangan, dan sebagainya.

4. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong munculnya tenaga kerja yang terampil, menguasai keterampilan dan keahlian hidup, serta tenaga kerja mandiri dengan bekal keahlian wirausaha.

5. Pemerataan pembangunan antardaerah.

Untuk itu, pemerintah harus secara proaktif memberikan sejumlah kemudahan, seperti bantuan kredit lunak untuk pengusaha kecil, mengadakan penyuluhan dan pelatihan. Dengan demikian, inti pembangunan ekonomi kerakyatan tidak lain adalah menyejahterakan masyarakat dalam dimensi lahir dan batin.

Upaya-upaya untuk memperkuat posisi rakyat atas Negara, tidak saja membutuhkan peran pemerintah – dalam hal ini adanya *political will* dari mereka tetapi juga peran aktif dari masyarakat sendiri.

Sesungguhnya hal ini sudah dimulai semenjak dasawarsa awal tahun 1980-an yang lalu. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan. Pada gilirannya, kebijakan pemerintah ini telah mendorong tumbuh dan munculnya berbagai kelompok atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kegiatan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini, baik yang dilakukan sendiri-sendiri atau yang dilakukan bekerja sama dengan pemerintah, telah mencakup banyak sektor, seperti usaha kecil dan perkreditan, kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, perbaikan lingkungan pedesaan, kependudukan dan keluarga berencana, dan sebagainya.

Pada dekade 80-an, muncul berbagai LSM yang bergerak dalam bidang advokasi, yang melakukan

berbagai pembelaan terhadap rakyat yang menjadi korban pembangunan, seperti pencemaran lingkungan, pembelaan terhadap rakyat yang tergusur, pembelaan terhadap hak-hak buruh, hak-hak kaum perempuan dan lain-lain.

Hal ini tampaknya sejalan *concern* dan keprihatinan global terhadap lingkungan hidup dan hal-hak asasi manusia. Saat ini banyak muncul dan tumbuh LSM-LSM baru yang mempunyai kepedulian untuk turut mengembangkan dan memberdayakan kekuatan rakyat dalam berbagai wilayah kehidupan.

Dengan demikian, letak kekuatan LSM, menurut Aswab Mahasin berada dalam usaha membela kepentingan masyarakat yang dilayaninya, baik melalui perundingan dengan pihak yang berwenang, penciptaan pendapat melalui media masa, upaya-upaya pendampingan *public hearing*, dengan wakil-wakil rakyat dan sebagainya.



STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MANDIRI

Oleh: Harris Fadhillah

Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerja sama yang saling menguntungkan.

Ekonomi mandiri merupakan sistem perekonomian rakyat, yang mengatur mekanisme sumber penghidupan pelaku ekonomi dalam konteks kehidupan masyarakat (gotong royong) berdasarkan kegiatan ekonomi yang tidak menganut prinsip ketergantungan, tetapi berdasarkan swadaya. Dikatakan juga bahwa ekonomi mandiri dikendalikan oleh balai sentra di setiap kecamatan bersama dengan pemda dan tokoh panutan lokal sipil.

Buku Konsep kemandirian tidak hanya mencakup pengertian kecukupan diri (*self- sufficiency*) di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi faktor manusia secara pribadi, yang di dalamnya mengandung unsur

penemuan diri (*self-discovery*) berdasarkan kepercayaan diri (*self confidence*). Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam pengertian sosial atau pergaulan antar manusia (kelompok, komunitas), kemandirian juga bermakna sebagai organisasi diri (*self-organization*) atau manajemen diri (*self-management*). Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dan melengkapi sehingga muncul suatu keseimbangan.

SDM dan produktivitas usaha masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi- strategi guna memberdayakan ekonomi rakyat mandiri, berikut strategi-strategi pemberdayaan melalui beberapa bidang yaitu:

1. Kebijakan

a. Kebijakan Pertanahan

Yaitu kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat adat untuk memperoleh hak pemilikan atas tanah ulayat, yang dapat membantu penguatan ekonomi rakyat. Masalah konversi lahan masih menjadi persoalan utama di sektor pertanian di Indonesia, luas lahan di Indonesia kian menyusut karena adanya konversi lahan. Apabila pemerintah mengakui hak pemilikan hutan ulayat, akan dapat dibangun Perusahaan Hutan

Rakyat dan Perusahaan Perkebunan Rakyat yang kepemilikan sahamnya oleh masyarakat adat setempat.

b. Sarana Produksi Pertanian

Pengadaan sarana produksi pertanian dalam jumlah sedikit akan meningkatkan harga per unit sarana produksi. Akibatnya, biaya produksi per unit produk menjadi tinggi. Produksi kecil dan keuntungan kecil, akan menjadi kendala untuk terjadinya akumulasi kapital di setiap unit produksi. (Mubyarto, 2004) Dengan skala usaha kecil- kecil dengan jumlah jutaan dan antara satu sama lain tidak ada keterkaitan, akan menyebabkan posisi tawar merek, baik di pasar *input* maupun di pasar *output*, sangat lemah. Oleh sebab itu melalui merger antar unit usaha pertanian atau *cooperate farming*, dapat menjadi jalan keluar yang relatif baik untuk masalah tersebut. Melalui *cooperate farming* (CF), produksi pertanian dilakukan melalui unit- unit perusahaan pertanian yang saham seluruhnya dimiliki oleh petani yang bersangkutan.

2. Infrastruktur Dasar

Peran swasta dalam pembangunan sarana pertanian perlu dicarikan skema yang saling menguntungkan agar swasta bisa tertarik. Gagasan Khudori beberapa waktu lalu di sebuah harian mengenai pendirian bank pertanian patut didukung, bila bank pertanian tersebut telah berdiri maka bisa diarahkan untuk membiayai infrastruktur

pangan. Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Dengan demikian percepatan pembangunan infrastruktur merupakan upaya yang harus dilakukan, mengingat masih banyaknya daerah-daerah terisolasi di Indonesia yang belum memiliki aksesibilitas sehingga menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk memasarkan produk unggulan. Di sisi lain, infrastruktur merupakan faktor kunci untuk menarik minat investor untuk menawarkan modalnya, terutama pada kawasan- kawasan potensial dan strategis. Untuk itu pemerintah meluncurkan beberapa fokus dan program dalam percepatan dan perluasan infrastruktur, antara lain:

- a) Peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi di kabupaten/ kota
- b) Percepatan dan perluasan akses masyarakat terhadap listrik dan air bersih
- c) Pengembangan infrastruktur untuk membuka dan meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi
- d) Peningkatan infrastruktur perdesaan dan pemukiman
- e) Peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan akses pelayanan publik.

3. Kelembagaan Petani

Sebagian besar usaha tani di Indonesia ini masih dikuasai oleh usaha tani dalam skala menengah ke bawah yang masih lemah di beberapa bidang berikut:

1. Keterbatasan aset produktif
2. Modal kerja
3. Daya tawar menawar transaksi
4. Kekuatan ekonomi politik

Oleh karena beberapa faktor yang masih menjadi titik kelemahan disektor pertanian di Indonesia ini maka petani di Indonesia perlu diberdayakan agar dapat tumbuh mandiri. Salah satu caranya adalah dengan membentuk organisasi petani lokal. Salah satu model pemberdayaan yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah mengucurkan kredit khusus untuk pertanian, dan dengan adanya sistem kredit ini diharapkan mendorong munculnya modernisasi. Dan dari adanya modernisasi khususnya dalam bidang pertanian diharapkan agar para kaum muda tidak berlomba- lomba mencari pekerjaan di kota melainkan menjadi tertarik untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada di desa.

4. Permodalan

- a) Alokasi Anggaran untuk KUR Salah satu bentuk dari memberdayakan ekonomi rakyat yang mandiri adalah dengan memberikan akses permodalan yang mudah khususnya kepada pelaku ekonomi rakyat mandiri. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah kemudahan akses untuk mendapatkan pinjaman ke lembaga keuangan, karena semakin mudah akses untuk meminjam uang untuk modal usaha di lembaga keuangan

maka UMKM semakin terbiasa berhubungan dengan lembaga keuangan formal dan pembelajaran bagi UMKM untuk mandiri dan efisien.

- b) Kebijakan Perpajakan Untuk mendorong UMKM bergabung pada koperasi (baik dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri) maka UMKM yang bergabung diberi keringanan pajak.
- c) Kebijakan Upah Tinggi rendahnya upah dan gaji yang diterima ditentukan dari kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan, tetapi juga sikap mental (etos kerja, profesionalitas, dan kedisiplinan).
- d) Bank Desa Bank Desa adalah bank yang mengatur pemberian kredit, lalu lintas transaksi keuangan, pembayaran, dan peredaran uang di desa-desa. Bank Desa berfungsi sebagai lembaga keuangan tingkat desa, melayani masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh bank umum. Salah satu badan hukum bank desa di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan pada UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit

Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD). Lembaga- lembaga yang dimaksud dalam undang-undang tersebut tidak serta-merta harus mengganti nama menjadi BPR, tapi sebatas status hukum kelembagaan serta aturan main yang berlaku terhadap lembaga tersebut.

5. Teknologi

Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Salah satu yang mempengaruhi pembangunan dan perkembangan ekonomi adalah kemajuan teknologi. (Sri Edi Swasono, 1985).

Teknologi adalah bagaimana faktor-faktor produksi dikombinasikan untuk merealisasikan tujuan-tujuan produksi .Sementara itu yang dimaksud dari perubahan teknologi adalah perubahan fungsi produksi dalam kegiatan tertentu, yang menyebabkan bertambahnya produksi sama dengan jumlah dan sumber produksi, tetapi jumlah sumber lebih sedikit sehingga teknologi merupakan upaya menciptakan barang cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa.

Dewasa ini Perkembangan Indonesia cukup pesat .Sumbangan modal terhadap pendapatan nasional diperkirakan mencapai 75%,sedangkan sumbangan tenaga kerja di bawah 20% dan ini menunjukkan

produktivitas tenaga kerja rendah.

6. Pemasaran

Dewasa ini globalisasi sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Globalisasi yang konsepnya perdagangan bebas membuat barang-barang dari luar negeri sangat banyak masuk ke Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih memilih produk luar negeri yang mutu dan gengsinya dan ini dapat melunturkan rasa nasionalisme kita dalam memilih barang. Tugas yang berat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia agar produk kita dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri. Program ekonomi kreatif adalah yang canangkan pemerintah. Program ini sangat bagus untuk memacu masyarakat Indonesia dalam hal berlomba-lomba meningkatkan kualitas maupun kekreatifannya agar dapat bersaing dengan produk luar negeri.

7. Pembangunan Masyarakat

Pengembangan masyarakat (*community development*) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat itu sendiri, karena praktiknya yang saling tumpang tindih, sehingga saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa.

Pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju ke arah yang lebih positif.

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* yang di mana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu syarat utama atau dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal, yaitu meliputi:

- a. Lingkungan Produksi
- b. Ekonomi
- c. Sosial dan ekologi

Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat akan didorong untuk memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal dan juga terlibat secara penuh dalam mekanis produksi, ekonomi, sosial dan ekologi.

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat yang seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* yang perlu direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau yang sering dikenal dengan sebutan semboyan.

Referensi:

Limbong, Bernhard. 2013. Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi. Jakarta: Margaretha Pustaka

Mukeri. 2012. Kemandirian Ekonomi Solusi Untuk Kemajuan Bangsa. Diakses pada 19 Oktober 2017 pukul 06.59 <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/view/92/89>

Swasono. Sri Edi, 1985. Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta. UI Press.

Mubyarto, 2004. Pemberantasan dan Pembangunan Sosial. Yogyakarta: PUSTEP- UGM & Aditya Media